

PENGARUH PENINGKATAN PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2016-2021)

Aurelia Rayhandita Anthony, Abdul Rohman¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +6282135240978

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of increasing Regional Original Income and Transfer Funds on Capital Expenditures with Economic Growth as a moderating variable. The type of data used is secondary data. The analytical method used to test the hypothesis in this research is Moderated Regression Analysis (MRA) with the SPSS program to test the data.

The population used in this research is the 2016-2021 APBD and GRDP Realization report in the Regencies/Cities of Central Java Province which consists of 35 Regencies/Cities. The sample used in this research was 210 data

The research results show that Regional Original Income and Transfer Funds have a significant effect on Capital Expenditures, however, the Economic Growth variable as a moderating variable is unable to influence Regional Original Income and Transfer Funds on Capital Expenditures.

Keywords: Transfer Funds, Capital Expenditures, Original Regional Income, Economic Growth

PENDAHULUAN

Pada tahun 1999 Indonesia sudah mereformasi pemerintahan dengan menetapkan kebijakan otonomi daerah. Program otonomi daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antar daerah mempercepat pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah serta mengoptimalkan pelayanan publik agar berkualitas semakin efisien, tanggap pada potensi, karakteristik ataupun kebutuhan masing-masing daerah. Dengan adanya otonomi daerah kemandirian keuangan dapat terwujud sehingga jika pemerintah daerah (pemda) berhasil mengembangkan pendapatannya maka dapat berpengaruh terhadap kemajuan kemampuan daerah dalam mendanai belanja daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berperan penting pada pembangunan daerah. PAD merupakan penerimaan yang didapat daerah melalui sumber dalam wilayah sendiri yang mencakup retribusi, pajak, pengelolaan kekayaan yang dipisah serta pendapatan asli daerah lainnya yang sah yang diambil berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga kemampuan daerah untuk melakukan pembangunan daerah dapat meningkat dengan adanya peningkatan PAD di dalam sistem keuangan daerah (Firdausy, 2017). Berdasarkan UU No 1 tahun 2022 selain PAD terdapat sumber lain untuk pembiayaan pembangunan daerah yaitu transfer dana pemerintahan. Dana Transfer berasal dari APBN dikirim ke daerah untuk menyubsidi kebutuhan daerah serta mengurangi kesenjangan sumber pembiayaan antar pemerintah pusat dan daerah. Salah satu bagian sumber pendapatan daerah bisa dipakai dalam keperluan belanja daerah ialah dana transfer.

Belanja daerah diutamakan dalam pelaksanaan pembangunan guna peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk memenuhi kewajiban. Belanja modal merupakan bagian dari belanja daerah dimana dalam peraturan pemerintah menerangkan jika belanja modal ialah pembiayaan anggaran dilakukan sebagai pembelian atau perolehan aset tetap serta aset lain dengan memberi manfaat lebih dari 1 periode akuntansi. Berdasarkan serapan dana APBN Jawa Tengah Tahun 2021

¹ Corresponding author

realisasi anggaran belanja modal memiliki persentase sebesar 28,42% atau senilai Rp3,27 triliun. Angka persentase belanja modal ini terlihat lebih rendah dari realisasi belanja bantuan sosial sebesar 42,06% atau senilai Rp30,51 miliar, belanja pegawai 55,47% atau senilai Rp8,62 triliun dan belanja barang sebesar 35,86% atau senilai Rp5,87 triliun. Dengan adanya fenomena ini realisasi belanja modal Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah terlihat belum optimal dan harus lebih diperhatikan. Alokasi belanja modal memiliki peran penting untuk lebih disorot sebab dapat memajukan produktivitas perekonomian di suatu daerah sehingga ketika belanja modal meningkat maka produktivitas ekonominya juga meningkat (Pertiwi dkk, 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang bisa menjadi tolak ukur kesuksesan pelaksanaan pembangunan dimana peningkatan kemampuan wilayah menyediakan lebih banyak barang ekonomi pada penduduk secara jangka panjang dikenal sebagai pertumbuhan ekonomi, dan kemampuan ini berkembang bersama dengan penyesuaian ideologi serta kemajuan teknologi (Pasa dkk, 2023). Dengan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maka semestinya dapat menaikkan PAD serta alokasi dana transfer. Terjadinya peningkatan suatu ekonomi daerah dapat berdampak meningkatnya pendapatan perkapita sehingga terjadi peningkatan konsumsi serta produktivitas penduduk. Semakin tinggi pendapatan daerah yang didapat akan semakin baik kapasitas masyarakat dalam memenuhi biaya yang sudah ditetapkan pemda. Hal tersebut juga meningkatkan sumber pendapatan dan menjadikan alokasi PAD serta dana transfer meningkat sehingga pemda bisa menggunakannya untuk memberi pelayanan publik yang lebih efektif serta memadai dari belanja modal. Adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi daerah dapat menarik minat investor sehingga dapat berdampak pada peningkatan sumber pendapatan daerah (Adyatma & Oktaviani, 2016).

Pada penelitian sebelumnya belum menemukan hasil penelitian yang konsisten terkait dengan pengaruh pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap belanja modal serta pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi (misalnya Cahyaning (2018); Fahrunisah & Baduri (2017); Muttaqin (2021); Muntazar (2020); Widiasmara (2019); Jaeni (2016); Prabawati & Wany (2018)). Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh kenaikan pendapatan asli daerah dan dana transfer terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai pemoderasi di kabupaten/kota Jawa Tengah. Terdapat 2 variabel independen yaitu PAD dan dana transfer, 1 variabel dependen yaitu belanja modal dan 1 variabel moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Agency Theory didefinisikan sebagai ikatan *keagenan* yang merupakan kontrak atau kesepakatan antar kedua pihak yakni *prinsipal* serta *agen*. *Prinsipal* sebagai pemberi wewenang dan *agen* sebagai pihak yang menerima wewenang dalam pengambilan keputusan atas *prinsipal* (Jensen & Meckling, 1976). Pada teori agensi termuat beberapa ketidaksesuaian kepentingan antar *prinsipal* dan *agen* sehingga *agen* dapat bertindak menyimpang atas kepentingan *prinsipals* seperti asimetri informasi dan perilaku oportunistik. Asimetri informasi dapat didefinisikan sebagai kondisi dimana satu pihak mempunyai informasi yang lebih daripada pihak yang lain. Adanya asimetris informasi dapat menyebabkan adanya ruang untuk terjadinya perilaku oportunistik dimana salah satu pihak bisa mengambil keuntungan dari pihak lain untuk kepentingan pribadi. Teori ini cocok apabila digunakan dalam menggambarkan hubungan keagenan di sektor pemerintahan yaitu antara legislatif (*prinsipal*) dan eksekutif (*agen*).

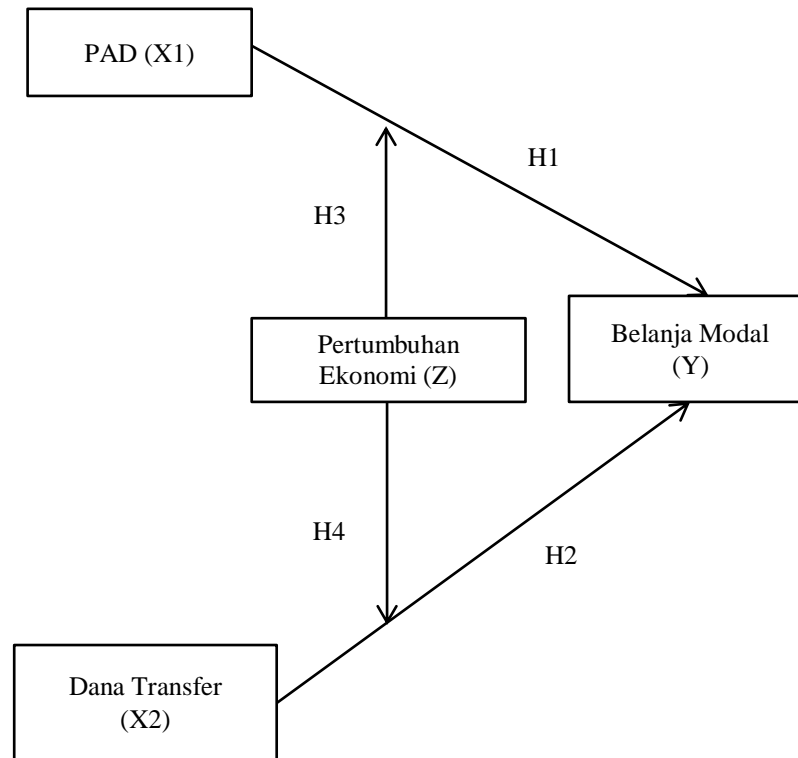
Dalam sektor publik, pemerintah daerah (pemda) berperan menjadi *agen* dan pemerintah pusat berperan menjadi *prinsipal* (Halim dan Abdullah, 2006). Penelitian ini menggunakan *Agency Theory* untuk menggambarkan hubungan *prinsipal* (pemerintah pusat) dengan *agen* (pemda) pada pembagian dana transfer serta hubungan diantara masyarakat (*prinsipal*) dengan pemda (*agen*). Pemerintah pusat memberikan otoritas pada pemda untuk membenahi dan mengurus sendiri daerahnya sehingga pemerintah pusat menyalurkan dana transfer untuk membantu pemerintah daerah memenuhi kebutuhan pendanaan pemerintah ataupun memberikan pelayanan publik yang berkualitas pada masyarakatnya. *Teori agensi* terjadi pada hubungan pemda dan masyarakatnya dimana masyarakat sebagai *prinsipal* sudah memasok sumber daya pada pemda berupa rutin membayar pajak, retribusi serta lainnya untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Sehingga seharusnya pemda sebagai *agen* memberi balasan pada masyarakat dengan memberikan pelayanan

publik yang baik serta memadai yang dibiayai oleh pemda. Secara garis besar, kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan antar variabel penelitian dalam bentuk skema. Penelitian ini menggunakan variabel independen, variabel dependen, dan variabel moderasi.

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Perumusan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

PAD merupakan sumber dana yang didapatkan melalui masyarakat seperti pajak daerah, retribusi, pengelolaan kekayaan dan lain sebagainya. Meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD) di struktur keuangan daerah dapat membuat kemampuan keuangan daerah makin baik untuk melakukan pembangunan daerah (Firdausy, 2017). Belanja modal merupakan belanja pemda yang mempunyai manfaat > 1 tahun dan dapat meningkatkan aset dan belanja rutin (Pertiwi, 2022). Belanja modal meliputi beberapa jenis yaitu gedung, jaringan, jalan, bangunan, irigasi, mesin, peralatan, aset tetap lain serta belanja aset lain. Pemda menyalurkan anggaran belanja modal sebagai implementasi program pembangunan melalui berbagai rencana di bidang pembangunan yang diharapkan dapat mencapai sektor ekonomi produktif masyarakat (Pertiwi, 2022).

Sesuai dengan teori agensi, hubungan antara masyarakat (agen) dan pemerintah daerah (prinsipal) pada konteks pendapatan asli daerah bisa dilihat dari tanggung jawab serta kemampuan pemda dalam memberi pelayanan publik yang baik dan mengalokasikan belanja modal agar meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sarana-prasarana yang baik dan layak yang dibiayai melalui belanja modal. Pemda (agen) memiliki tanggung jawab terhadap masyarakat (prinsipal) karena masyarakat sudah menyerahkan dana pada pemda melalui retribusi, pajak serta lain-lainnya. Adanya sarana prasarana yang baik dan memadai dapat membuat produktivitas perekonomian daerah meningkat. Dalam studi dikerjakan oleh Sugiardi dan Supadmi (2014), Cahyaning (2018), serta Muntazar et al. (2020) menemukan jika PAD berpengaruh signifikan positif pada belanja modal. Sehingga bisa memperlihatkan jika belanja modal bisa dipengaruhi PAD.

H1: Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal.

Pengaruh Dana Transfer pada Belanja Modal

Dalam UU Nomor 1 Tahun 2022, dana transfer ialah dana yang ditransfer ke daerah dan berasal dari APBN yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana ini bertujuan untuk mendanai kebutuhan dan membentuk keseimbangan finansial di antara pemerintah daerah dan pusat. Teori agensi didefinisikan sebagai ikatan keagenan yang menggambarkan perjanjian atau persetujuan dimana principal melibatkan agen untuk melakukan beberapa kepentingan dengan nama prinsipal yang mengimplikasikan pemberian wewenang pada agen (Jensen & Meckling, 1976). Oleh sebab itu, pemerintah pusat (prinsipal) mengalokasikan dana kepada pemda (agen) untuk menekan ketimpangan dalam kebutuhan finansial di setiap daerah. Meningkatkannya alokasi belanja modal dapat ditentukan oleh besarnya pendapatan asli daerah serta dana transfer dari pusat, sehingga suatu daerah yang bisa meningkatkan pemasukan daerah dari berbagai sumber yang sah akan berdampak pula pada alokasi belanja modal yang semakin tinggi (Irwan, Mursalim, Nurwanah, 2022).

Hasil penelitian dari Priatna & Purwadinata (2019) dan Muttaqin, dkk (2021) memiliki hasil jika transfer dana mempunyai pengaruh positif signifikan pada belanja modal. Demikian pula dengan penelitian Irwan, Mursalim, dan Nurwanah (2022) dimana disebutkan jika dana transfer memiliki pengaruh positif signifikan ke belanja modal. Sehingga menunjukkan belanja modal dapat dipengaruhi dengan perolehan dana transfer.

H2: Dana Transfer memiliki pengaruh positif pada Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dalam Hubungan PAD dan Belanja Modal

Pertumbuhan ekonomi ialah penunjuk ukuran kinerja perekonomian baik tingkat daerah ataupun nasional. Berkaitan dengan teori keagenan, kewajiban pemerintah daerah (*agen*) pada masyarakat (*prinsipal*) yakni mengadakan fasilitas publik yang efisien dan terbaik pada masyarakat dengan belanja modal. Pembangunan suatu daerah dapat dipengaruhi oleh kuatnya pertumbuhan ekonomi di daerah. Pembangunan yang baik salah satunya yakni dengan mengoptimalkan dan memperbaiki sarana-prasarana umum. Pertumbuhan ekonomi digunakan di penelitian untuk moderasi karena diduga pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan dari PAD ke belanja modal. Makin berkembangnya ekonomi di daerah semestinya bisa menaikkan PAD serta mempengaruhi banyaknya alokasi belanja modal sehingga pembangunan infrastruktur serta sarana-prasarana daerah dapat dibelanjakan melalui belanja modal.

Riset Sugiardi & Supadmi (2014) serta Jaeni (2016) mengemukakan pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi hubungan PAD dan belanja modal. Demikian juga hasil riset Fahrudin & Badjuri (2017) yang menemukan jika pertumbuhan ekonomi terbukti memoderasi PAD ke belanja modal. Hal ini bisa mengindikasikan jika pertumbuhan ekonomi bisa memperkuat hubungan PAD dan belanja modal.

H3: Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat hubungan PAD dan Belanja Modal.

Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Dalam Hubungan Dana Transfer dan Belanja Modal

Teori keagenan berbicara mengenai principal yang memberikan wewenangnya kepada agen. Transfer dana ke daerah ialah bukti pelimpahan kewenangan pemerintah pusat (prinsipal) pada pemda (agen). Transfer dana ialah dana dari APBN dan dibagikan untuk mendanai keseimbangan keuangan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang merupakan hak daerah. Setiap dana transfer yang didapat oleh daerah akan mampu meningkatkan belanja pemda khususnya bagi peningkatan belanja modal yang bisa dimanfaatkan demi keperluan suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi yaitu proses naiknya output perkapita jangka panjang. Tingkat pertumbuhan ekonomi bisa diperkuat dengan adanya dana transfer ke daerah yang digunakan untuk kepentingan belanja modal (Hasan dan Azis, 2018). Oleh karena itu, transfer dana dan belanja modal di suatu daerah seharusnya meningkat sebanding dengan pertumbuhan ekonomi. Dengan semakin tingginya transfer dana dari APBN yang di bagikan ke daerah untuk kesimbangan finansial antar daerah dapat dimanfaatkan oleh pemda dengan memberi layanan publik dan fasilitas yang baik dan memadai untuk masyarakat menggunakan belanja modal.

Studi oleh Irwan, Mursalim, dan Nirwanah (2022) serta Cahyaning (2018) menyimpulkan jika pertumbuhan ekonomi memperkuat hubungan diantara dana transfer dan belanja modal. Sehingga ini mampu mengindikasikan jika pertumbuhan ekonomi bisa memperkuat hubungan dana transfer dan belanja modal.

H4: Pertumbuhan Ekonomi mampu memperkuat hubungan Dana Transfer dan Belanja Modal.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu PAD serta Dana Transfer, satu variabel dependen yaitu belanja modal dan satu variabel moderasi yaitu Pertumbuhan Ekonomi.

Tabel 1
Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator
Pendapatan Asli Daerah	PAD ialah pendapatan daerah didapatkan melalui pajak, pengelolaan kekayaan dipisahkan, retribusi, lain-lain PAD sah serta diambil berlandaskan peraturan perundang-undangan daerah dengan tujuan untuk membiayai penyelenggaraan otonomi sebagai penerapan asas desentralisasi.	Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan menggunakan (Cahyaning, 2018): PAD = Pajak Daerah + Retribusi + Pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan + Lain-lain PAD Sah
Dana Transfer	Dana transfer ialah transfer bersumber pada APBN dan memiliki tujuan membantu daerah membiayai kepentingan daerahnya. Transfer dana terbagi tiga jenis DBH, DAU serta DAK.	Dana Transfer dapat diukur dengan menggunakan (Irwan, Mursalim, dan Nirwanah, (2022): Dana Transfer = DBH + DAU + DAK
Belanja Modal	Belanja ini ialah pengeluaran atas pembelian atau perolehan aset tetap serta lainnya dan mempunyai kegunaan lebih 1 periode akuntansi. Belanja ini terdiri dari belanja peralatan, bangunan, gedung, jaringan, tanah, irigasi, jalan, belanja aset tetap lain serta aset lain.	Belanja Modal dapat diukur dengan menggunakan (Fathia & Rusdi, 2020): Belanja Modal = Belanja Tanah + Peralatan + Mesin + Gedung + Bangunan + Jalan + Irigasi + Jaringan + Aset Tetap Lain + Aset Lainnya
Pertumbuhan Ekonomi	Proses naiknya output perkapita pada waktu lama disebut dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi ialah alat mengetahui kinerja perekonomian dan keberhasilan pembangunan.	Pertumbuhan Ekonomi dapat diukur dengan menggunakan (Irwan, Mursalim, dan Nirwanah, (2022): $\frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$

Penentuan Sampel

Populasi yakni seluruh kejadian, sekelompok ataupun hal menarik sehingga peneliti ingin melakukan investigasi (Sekaran & Bougie, 2019). Populasi yang dipakai pada penelitian merupakan laporan realisasi APBD serta data PDRB tahun 2016-2021 di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah berjumlah 35 memiliki 29 Kabupaten serta 6 Kota. Penelitian ini menggunakan sampel jenuh dimana sampel penelitian ini ialah semua anggota populasi dimana penelitian ini

menggunakan data tahun 2016-2021 dengan 35 daerah sehingga total sampel adalah 35 x 6 tahun = 210 data pengamatan.

Metode Analisis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji t dan uji regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing independen pada dependen serta mengamati apakah variabel moderator dapat memoderasi hubungan antara independen dengan dependen. Model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$(1) Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \varepsilon$$

$$(2) Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 * Z + \varepsilon$$

$$(3) Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \varepsilon$$

$$(4) Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \beta_3 X_2 * Z + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Belanja Modal

α = Konstanta

β = Koefisien Regresi

X_1 = PAD

X_2 = Dana Transfer

Z = Pertumbuhan Ekonomi

$X_1 * Z$ = PAD * Pertumbuhan Ekonomi

$X_2 * Z$ = Dana Transfer * Pertumbuhan Ekonomi

ε = Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh peningkatan pendapatan asli daerah serta dana transfer pada belanja modal dengan moderasi yaitu pertumbuhan ekonomi. Objek penelitian ialah PAD, dana transfer, belanja modal serta pertumbuhan ekonomi. Populasi yang dipakai ialah laporan realisasi APBD serta data PDRB Tahun 2016-2021 Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan 35 Kab/kota. Sampel yang dipakai adalah 210 data yang diambil dari semua anggota populasi.

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik ini dapat dipakai menganalisis dan memberi gambaran data terkumpul yang diamati dari min, maximum, mean. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif

	N	Min.	Max.	Mean
PAD	210	17128000000	238594000000	400825857142,86
Dana Transfer	210	55312000000	282440000000	150404233333,33
Belanja Modal	210	10208000000	127536000000	356216904761,90
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	210	5521525540000	144704571510000	26553773853019,05

Sumber: Output Olahan Data SPSS 26 (2023)

Penjabaran untuk masing-masing variabel adalah:

1. Hasil dengan SPSS di tabel 2 menunjukkan maximum Pendapatan Asli Daerah (PAD) didapatkan Kota Semarang tahun 2021 sebanyak Rp2.385.940.000.000 yang berarti sampel penelitian mempunyai Pendapatan yang cukup besar dimana nilai terendah Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp171.280.000.000 didapatkan Kabupaten Blora tahun 2016 dan jumlah rata-rata PAD pada periode tahun 2016-2021 memiliki nilai sebesar Rp400.825.857.142,86.
2. Dana Transfer menunjukkan nilai maksimum diperoleh Kabupaten Banyumas pada tahun 2021 sebesar Rp2.824.400.000.000 yang artinya sampel memiliki dana transfer cukup tinggi dimana nilai rendah dana transfer sebanyak Rp553.120.000.000 didapatkan Kota

- Magelang di tahun 2017 serta jumlah nilai rata-rata (mean) dana transfer pada periode tahun 2016-2021 memiliki nilai sebesar Rp1.504.042.333.333,33.
3. Belanja Modal mempunyai nilai maksimum yang didapat Kota Semarang di tahun 2017 sebanyak Rp1.275.360.000.000 yang artinya sampel penelitian mempunyai belanja modal cukup tinggi dimana nilai rendah belanja modal sebanyak Rp102.080.000.000 didapatkan Kabupaten Temanggung di tahun 2020 dan mean belanja modal pada periode tahun 2016-2021 memiliki nilai sebesar Rp356.216 904.761,90.
 4. Pertumbuhan Ekonomi Daerah memiliki nilai maksimum yang didapat Kota Semarang di tahun 2021 sebanyak Rp144.704.571.510.000 yang artinya sampel penelitian mempunyai pertumbuhan ekonomi daerah cukup tinggi dimana nilai rendah pertumbuhan ekonomi sebanyak Rp5.521.525.540.000 didapatkan Kota Magelang di tahun 2016 dan jumlah nilai rata-rata (mean) pertumbuhan ekonomi daerah pada periode tahun 2016-2021 memiliki nilai sebesar Rp26.553.773.853.019,05.

Uji Hipotesis

Tabel 3
Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	44993212785,1	32197434204,6		1,397	0,164
X1 PAD	0,351	0,032	0,571	11,036	0,000
X2 DT	0,113	0,021	0,275	5,316	0,000

Sumber : Output Olahan Data SPSS 26 (2023)

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, dapat diketahui jika variabel PAD (X1) dan DT (X2) menunjukkan nilai signifikansi 0,000. Sehingga, variabel PAD dan Dana Transfer memiliki signifikan < 0,05 Sehingga PAD memiliki pengaruh signifikan pada belanja modal.

Tabel 4
Uji MRA Output pertama variabel X₁ dan variabel moderasi terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	20152922297	15197541387,9		13,261	0,000
	1,2				
X1 PAD	0,172	0,056	0,280	3,091	0,002
Z PED	0,003	0,001	0,443	4,882	0,000

Sumber : Output Olahan Data SPSS 26 (2023)

Tabel 5
Uji MRA Output kedua dengan interaksi X₁ dengan variabel moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	199997671095,8	37166562920,5		5,381	0,000
X1 PAD	0,177	0,115	0,288	1,538	0,125
Z PED	0,003	0,001	0,444	4,526	0,000
X1*Z	-3,709	0,000	-0,009	-0,045	0,964

Sumber : Output Olahan Data SPSS 26 (2023)

$$(1) Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \varepsilon$$

$$(2) Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 Z + \beta_3 X_1 * Z + \varepsilon$$

Hasil pengujian menghasilkan bahwa koefisien β_2 memiliki signifikan sebanyak 0,000 di bawah 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Sedangkan tabel 5 diketahui signifikan koefisien $\beta_3 > 0,05$ yakni 0,964 dengan Beta -3,709 sehingga dinyatakan tidak signifikan dan menunjukkan arah negatif. Oleh karena itu, dapat dinyatakan variabel pertumbuhan ekonomi tidak bisa memperkuat hubungan PAD dan belanja modal.

Tabel 6
Uji MRA Output pertama variabel X₂ dan variabel moderasi terhadap Y

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	100380213981,2	31680168855,1		3,169	0,002
X2 DT	0,093	0,022	0,226	4,313	0,000
Z PED	0,004	0,000	0,596	11,361	0,000

Sumber : Output Olahan Data SPSS 26 (2023)

Tabel 7
Uji MRA Output kedua dengan interaksi X₂ dengan variabel moderasi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	81288504852,8	46971089497,2		1,731	0,085
X2 DT	0,105	0,030	0,254	3,485	0,001
Z PED	0,006	0,002	0,755	2,574	0,011
X2*Z	-6,653	0,000	-0,173	-0,551	0,582

Sumber : Output Olahan Data SPSS 26 (2023)

$$(3) Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \varepsilon$$

$$(4) Y = \alpha + \beta_1 X_2 + \beta_2 Z + \beta_3 X_2 * Z + \varepsilon$$

Hasil pengujian menghasilkan bahwa koefisien β_2 memiliki nilai signifikan sebanyak 0,000 di bawah 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Sementara tabel 7 diketahui signifikan koefisien $\beta_3 > 0,05$ yakni 0,582 dengan Beta -6,653 sehingga dinyatakan tidak signifikan dan menunjukkan arah negatif. Maka disimpulkan pertumbuhan ekonomi tidak bisa memperkua hubungan dana transfer dan belanja modal.

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal

Berdasarkan pengujian t variabel PAD (X1) mendapatkan signifikan sebanyak $0,000 < 0,05$ serta memiliki koefisien sebesar 0,351 yang memiliki arah yang positif. Sehingga bisa ditarik kesimpulan PAD mempunyai pengaruh pada belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis satu (H_1) yang mengutarakan PAD memiliki pengaruh positif pada belanja modal diterima. Jadi dapat diartikan bahwa makin meningkatnya PAD dalam keuangan daerah akan meningkatkan alokasi belanja modal.

Berdasarkan teori keagenan dimana teori ini didefinisikan sebagai ikatan kontrak antara prinsipal dan agen, hubungan kontrak antara agen dan prinsipal dapat dilihat dari pemda (agen) yang mempunyai tanggung jawab untuk lebih mengoptimalkan alokasi belanja modal dengan mewujudkan pelayanan publik yang baik serta mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat (prinsipal) karena masyarakat sudah menyerahkan dana pada pemda melalui retribusi, pajak, serta lain-lainnya dengan cara mengadakan sarana-prasarana baik dan memadai yang didanai melalui belanja modal. Adanya sarana prasarana yang baik serta memadai membuat produktivitas perekonomian daerah bisa meningkat dan berdampak meningkatkan PAD di Jawa Tengah yang diterima oleh pemerintah daerah. Sehingga dengan adanya peningkatan PAD di Jawa Tengah yang didapatkan pemda maka makin banyak alokasi belanja modal yang bisa dikeluarkan guna melengkapi kebutuhan masyarakat.

Hasil senada dengan riset oleh Sugiardi & Supadmi (2014) menyatakan PAD memiliki pengaruh positif serta signifikan pada belanja modal. Hasil riset oleh Cahyaning (2018) juga membuktikan PAD mempunyai pengaruh pada belanja modal. Demikian pula temuan dari Muntazar et al. (2020) bahwa PAD berpengaruh positif serta signifikan pada belanja modal.

Pengaruh Dana Transfer pada Belanja Modal

Berdasarkan pengujian uji t variabel Dana Transfer (X2) mempunyai nilai signifikan sejumlah $0,000 < 0,05$ serta mempunyai koefisien sebesar 0,113 dan memiliki arah positif. Sehingga bisa dikatakan dana transfer memiliki pengaruh pada belanja modal. Oleh karena itu, hipotesis dua (H_2) yang mengutarakan Dana Transfer memiliki pengaruh positif pada belanja modal diterima.

Di penelitian ini *Agency Theory* didefinisikan hubungan keagenan merupakan kontrak atau persetujuan dimana principal melibatkan agen supaya melakukan kepentingan atas nama prinsipal dan mengikutsertakan penyerahan kewenangan pengambilan keputusan pada agen (Jensen & Meckling, 1976). Peningkatan alokasi Dana transfer pemerintah daerah Jawa Tengah sangat ditentukan oleh besarnya APBN yang bertujuan membantu membiayai kepentingan daerah dan membentuk keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemda Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, pemerintah pusat (prinsipal) memberi alokasi dana transfer dari pemerintah pusat pada pemda Jawa Tengah (agen) yang bertanggung jawab untuk menekan ketimpangan dalam kebutuhan finansial di setiap daerah. Adanya dana transfer yang didapatkan pemda Jawa Tengah nantinya bisa dipakai untuk belanja daerah termasuk belanja modal yang ialah salah satu komponen dari belanja daerah. Semakin banyak dana transfer yang diberikan ke daerah mengakibatkan alokasi belanja modal juga meningkat sehingga pembangunan daerah pada berbagai bidang seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi dan berbagai sarana prasarana melalui belanja modal dapat terpenuhi.

Hasil ini senada dengan penelitian dari Priatna dan Purwadinata (2019) dimana dana transfer memberi pengaruh positif serta signifikan pada belanja modal. Riset Muttaqin, dkk (2021) juga menyatakan dana transfer memberi pengaruh positif serta signifikan pada belanja modal. Demikian pula hasil riset Irwan, Mursalim, dan Nurwanah (2022) yang menemukan bahwa dana transfer mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi memperkuat dalam hubungan PAD dan Belanja Modal

Pada tabel 4 ditemukan pengaruh variabel moderasi pada variabel dependen memiliki sig $0,000 < 0,05$ dinyatakan signifikan. Sedangkan di tabel 5 bisa dilihat pengaruh dari interaksi variabel moderasi dengan independen pada dependen mempunyai nilai $> 0,05$ yaitu 0,964 sehingga dinyatakan tidak signifikan. Oleh karena itu, Hipotesis tiga (H_3) yang mengutarakan pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat hubungan PAD dan belanja modal ditolak.

Dapat ditarik kesimpulan variabel pertumbuhan ekonomi tidak bisa memperkuat hubungan PAD pada belanja modal. Hal tersebut bisa diakibatkan karena pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah tidak merata serta terdapat kesenjangan pada tiap wilayah. Hal ini terjadi sebab adanya kenaikan PAD dalam keuangan daerah yang seharusnya dialokasikan ke Belanja Modal untuk meningkatkan pembangunan daerah di Jawa Tengah dengan membuat pelayanan yang baik serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan sarana dan prasarana yang baik dan memadai lebih banyak dipakai mendanai belanja pegawai serta barang. Oleh sebab itu, kurang tepatnya sasaran program pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah tidak rata serta membuat kesenjangan pada tiap wilayah.

Hasil penelitian dari Cahyaning (2018) mendukung hasil penelitian ini dengan menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu memperkuat hubungan antara PAD dan belanja modal.

Pertumbuhan Ekonomi memperkuat hubungan Dana Transfer dan Belanja Modal

Tabel 6 diketahui pengaruh variabel moderasi pada dependen mempunyai signifikan 0,000 dibawah 0,05 sehingga dinyatakan signifikan. Sedangkan pada tabel 7 didapatkan pengaruh dari interaksi variabel moderasi dengan independen pada variabel dependen mempunyai nilai $> 0,05$ yakni 0,582 dinyatakan tidak signifikan. Maka dapat disimpulkan variabel pertumbuhan ekonomi tidak bisa memperkuat hubungan dana Transfer dan belanja modal. Hipotesis keempat (H_4) yang mengutarakan pertumbuhan ekonomi dapat memperkuat hubungan dana transfer dan belanja modal ditolak.

Dikaitkan pada teori keagenan maka ini dapat diakibatkan karena ada masalah keagenan timbul di kaum *eksekutif* (pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jawa Tengah) yang condong mementingkan kepuasan atau keuntungan sendiri pada penyusunan ataupun pembuatan anggaran APBD karena mempunyai lebih banyak informasi (*asimetri informasi*). Hal ini dapat timbul karena pihak eksekutif ingin menyelamatkan posisi dalam pemerintahan di mata masyarakat akan tetapi penyimpangan anggaran APBD lebih cenderung digunakan untuk kebutuhan pribadi kaum eksekutif daripada untuk kepentingan masyarakat. Adanya perilaku menyimpang (perilaku oportunistik) yang dilakukan pemerintah pusat (prinsipal) dan daerah (agen) dapat mempengaruhi alokasi dana transfer yang seharusnya digunakan untuk mendanai pemerataan keuangan antar daerah serta membiayai belanja modal. Sehingga kesenjangan pertumbuhan ekonomi terjadi di wilayah daerah Jawa Tengah. Adanya kesenjangan tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah tidak mampu memperkuat hubungan dana transfer dan belanja modal.

Riset didukung dari hasil penelitian Adyatma dan Oktaviani (2016) serta penelitian dari Hadi dan Kusuma (2023) mengemukakan pertumbuhan ekonomi tidak bisa memoderasi hubungan dana transfer pada belanja modal.

KESIMPULAN

Tujuan penelitian ialah pengujian dan membuktikan adanya pengaruh kenaikan PAD serta dana transfer pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai moderasi. Objek penelitian dipakai pada penelitian ialah PAD, dana transfer, belanja modal yang terdapat di laporan APBD serta pertumbuhan ekonomi seluruh Kab/Kota Jawa Tengah di tahun 2016-2021. Menurut hasil dan pembahasan dari penelitian ini disimpulkan:

1. PAD mempunyai pengaruh secara positif signifikan pada belanja modal Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pada 2016-2021.
2. Dana Transfer mempunyai pengaruh secara positif signifikan pada belanja modal Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pada 2016-2021.

3. Pertumbuhan Ekonomi sebagai moderasi tidak bisa memperkuat hubungan PAD pada belanja modal Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah pada 2016-2021.
4. Pertumbuhan Ekonomi sebagai moderasi tidak bisa memperkuat hubungan dana transfer pada belanja modal Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah di 2016-2021.

Pada penelitian ini tentunya ada kekurangan yang perlu diperbaiki untuk kedepannya. Ada sejumlah keterbatasan yang perlu diperhatikan peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat menyempurnakan penelitian. Keterbatasan penelitian ini, yakni:

1. Data dari penelitian ini hanya menggunakan data dari Provinsi Jawa Tengah saja akibatnya kurang menggambarkan kondisi pemerintahan daerah dengan menyeluruh.
2. Dalam penelitian ini terbatas pada penggunaan dua variabel independen yaitu PAD serta dana transfer, satu dependen yakni belanja modal serta satu variabel moderasi yakni pertumbuhan ekonomi.

REFERENSI

- Firdausy, C. M. (2017). *Kebijakan & strategi peningkatan pendapatan asli daerah dalam pembangunan nasional* (C. M. Firdausy, Ed.; Cetakan 1). Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Pemerintah Pusat. (2022b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.
- Pertiwi, D., Maksum, A., & Lumbanraja, P. (2022). The Effect of Original Local Government Revenue, General Allocation Fund, and Specific Allocation Fund on Economic Growth with Capital Expenditures as a Moderating Variable in Regencies and Cities in North Sumatra Province. *International Journal of Research and Review*, 9(7), 172–186. <https://doi.org/10.52403/ijrr.20220719>
- Pasa, S. R., Kawung, G. M., & Pingkan Rorong, I. F. (2023). ANALISIS PENGARUH PAD DAN DANA TRANSFER TERHADAP BELANJA MODAL SERTA DAMPAKNYA KE PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(1). <https://doi.org/10.35794/jpek.44281.24.1.2023>
- Adyatma, E., & Oktaviani, R. M. (2016). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI*. 4(2). <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fe9/article/view/4598>
- Jensen, M. C., Meckling, W. H., Benston, G., Canes, M., Henderson, D., Leffler, K., Long, J., Smith, C., Thompson, R., Watts, R., & Zimmerman, J. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. In *Journal of Financial Economics* (Issue 4). Harvard University Press. <http://hupress.harvard.edu/catalog/JENTHF.html>
- Sugiartih, N. P. D. E. R. S., & Supadmi, N. L. (2014). *PENGARUH PAD, DAU, DAN SILPA PADA BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI PEMODERASI*. 7, 477–495.
- Muntazar, M., Ibrahim, R., Hakim, L., & Djalil, M. A. (2020). The Effect of Regional Original Revenue, General Allocation Funds, and Special Allocation Funds on Capital Expenditures at Regional Governments in Aceh Province, Indonesia. *Cross Current International Journal of Economics, Management and Media Studies*, 2(3), 65–71. <https://doi.org/10.36344/ccijemms.2020.v02i03.003>
- Cahyaning, S. (2018). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2013-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1). <https://doi.org/10.20473/jiet.v3i1.7874>
- Priatna, H., & Purwadinata, J. (2019). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG*. 3(2), 62–74.

- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>
- Irwan, Mursalim, & Nurwanah. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Selatan). *Journal of Accounting Finance (JAF)*, 3(1). <https://doi.org/10.33096/jaf.v3i1.919>
- Jaeni, J. (2016). *PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL*.
- Fahrunisah, N., & Badjuri, A. (2017). *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2013-2015)*. 6(2), 189–205.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). *PEMBANGUNAN EKONOMI & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: STRATEGI PEMBANGUNAN MANUSIA DALAM PERSPEKTIF EKONOMI LOKAL* (Edisi Kedua). CV. Nur Lina.
- Fathia, P. B., & Rusdi, D. (2020). *PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA MODAL (Studi Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah 2015-2018)*.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2019). *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian: Vol. Buku 2* (Edisi 6). Salemba Empat.
- Muttaqin, E. E., Sari, W. P., Ritonga, P., & Fadillah, D. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintahan Daerah Kabupaten. *Economics, Business and Management Science Journal*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.34007/ebmsj.v1i1.7>